

DAMPAK TUNTUTAN *COMFORT WOMEN* TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK JEPANG – KOREA SELATAN

Oleh: Erlin Luz Clarita Br Sitorus
Pembimbing: Dr. Saiman, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp.Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak isu *comfort women* terhadap hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, serta dianalisis melalui perspektif konstruktivisme historis yang dikembangkan oleh Duncan Bell juga dengan teori gerakan sosial dari Charles Tilly. Fokus kajian berada pada periode 2015 hingga 2022, mencakup dinamika pasca-Kesepakatan *comfort women* tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memori kolektif atas isu *comfort women* menjadi faktor penting yang memicu resistensi publik terhadap Jepang, terlihat dari gerakan sosial, kampanye boikot produk Jepang, dan tekanan domestik terhadap pemerintah Korea untuk meninjau ulang kerja sama diplomatik dan keamanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian isu *comfort women* tidak cukup melalui pendekatan legal-formal, tetapi memerlukan pendekatan empatik dan simbolik yang mampu menjawab dimensi historis dan moral dari permasalahan ini.

Kata Kunci: *Comfort Women, The Korean Council, Korea Selatan, Jepang, Perjanjian 2015, Ketegangan Diplomatik*

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the comfort women issue on diplomatic relations between South Korea and Japan. This research employs a qualitative approach using a case study method and is analyzed through the lens of historical constructivism developed by Duncan Bell, alongside Charles Tilly's theory of social movements. The study focuses on the period from 2015 to 2022, covering the dynamics following the 2015 Comfort Women Agreement. The findings indicate that the collective memory of the comfort women issue plays a critical role in fueling public resistance against Japan, as evidenced by social movements, boycotts of Japanese products, and domestic pressure on the South Korean government to reassess diplomatic and security cooperation. This study concludes that resolving the comfort women issue requires more than a legal-formal approach; it demands an empathetic and symbolic response that addresses the historical and moral dimensions of the problem.

Keywords: *Comfort Women, The Korean Council, South Korea, Japan, 2015 Agreement, Diplomatic Tensions*

A. PENDAHULUAN

Korea Selatan dan Jepang merupakan dua kekuatan utama di kawasan Asia Timur yang memiliki kedekatan geografis serta keunggulan dalam bidang ekonomi, teknologi, dan budaya. Namun, hubungan bilateral keduanya sering kali mengalami ketegangan, terutama karena sejarah kolonial Jepang atas Korea pada tahun 1910–1945. Salah satu warisan paling problematik dari masa penjajahan tersebut adalah isu *comfort women*, yang hingga kini menjadi sumber perpecahan dalam hubungan diplomatik kedua negara.

Isu *comfort women* mengacu pada praktik sistematis perbudakan seksual yang dilakukan oleh militer Jepang terhadap perempuan dari negara-negara yang diduduki selama Perang Dunia II, termasuk Korea, Tiongkok, Filipina, Indonesia, dan lainnya. Diperkirakan antara 70.000 hingga 200.000 perempuan terlibat dalam sistem ini, dengan sekitar 80 persen berasal dari Korea.¹ Banyak dari mereka direkrut secara paksa melalui Korps Tenaga Kerja Sukarela atau *Chôngsindae*, yang pada praktiknya tidak bersifat sukarela. Perempuan-perempuan ini awalnya dijanjikan pekerjaan di pabrik atau tempat lainnya, tetapi justru dipaksa melayani tentara Jepang secara seksual di *comfort stations*.

Tujuan utama sistem ini adalah untuk menjaga moral prajurit Jepang, mengurangi penyebaran penyakit menular seksual melalui pemeriksaan rutin, serta menghindari insiden

pemeriksaan yang dapat memicu perlawanan dari penduduk lokal. Dalam praktiknya, para korban mengalami kekerasan fisik dan seksual yang ekstrem, termasuk pemukulan, penyiksaan, infeksi, bahkan kematian. Mereka dipaksa melayani hingga 30 tentara per hari, dan sebagian besar menderita gangguan psikologis yang parah.² Beberapa korban bahkan melakukan percobaan bunuh diri atau dirawat di rumah sakit jiwa. Hal ini tercermin dalam wawancara-wawancara yang dilakukan oleh Pyong Gap Min, yang menunjukkan bukti luka fisik dan trauma psikologis mendalam pada para penyintas.

Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, banyak *comfort women* dibiarkan begitu saja dalam kondisi fisik dan mental yang rusak. Namun, karena adanya stigma sosial dan tabunya isu seksual, para korban memilih bungkam. Pemerintah Jepang pun tidak secara aktif mengakui keterlibatannya, sehingga isu ini terkubur selama lebih dari empat dekade. Situasi mulai berubah pada 14 Agustus 1991, ketika Kim Hak Sun, seorang penyintas asal Korea, secara terbuka menyuarakan pengalamannya dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah Jepang.³ Keberanian Kim Hak Sun mendorong banyak korban lainnya untuk bersuara, dan sejak saat itu isu *comfort women* menjadi perhatian domestik dan internasional.

Perjuangan para korban kemudian didampingi oleh berbagai organisasi

¹ Christine Wawrynek, "World War II Comfort women: Japan's Sex Slaves or Hired Prostitute?", *Journal of Human Rights Summer*, U. N. Reports, New York Law School, (Summer, 2003)

² Maria Rosa Henson, *Comfort Woman: A*

Filipina's Story of Prostitution and Slavery under the Japanese Military, pengantar oleh Yuki Tanaka, kata pengantar oleh Cynthia Enloe (Rowman & Littlefield, 1999).

³ *Digital Museum the Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund*, 2000

masyarakat sipil, terutama *The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan* (The Korean Council), yang aktif mengadvokasi keadilan bagi para penyintas. Tekanan publik semakin meningkat ketika sejarawan Jepang Yoshimi Yoshiaki pada Januari 1992 menemukan dokumen resmi militer Jepang yang membuktikan keterlibatan langsung mereka dalam pembentukan dan pengelolaan *comfort stations*. Temuan ini memaksa Perdana Menteri Jepang saat itu, Miyazawa Kiichi, untuk menyampaikan permintaan maaf saat berkunjung ke Korea Selatan pada 1992.

Pada tahun 2015, Korea Selatan dan Jepang menandatangani *Japan-ROK Agreement on Comfort Women*, yang secara sepintas dianggap sebagai solusi final. Namun, kesepakatan ini menuai kritik luas karena tidak melibatkan para korban secara langsung dan dianggap tidak mewakili tuntutan mereka akan pengakuan, permintaan maaf resmi, dan kompensasi negara. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahkan menunjukkan sikap tidak kooperatif dengan menolak permintaan maaf yang disampaikan pemimpin sebelumnya dan menganggap bahwa praktik *comfort women* merupakan tindakan individu, bukan tanggung jawab negara.

Situasi tersebut memperburuk hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang. Isu *comfort women* telah menjadi simbol dari luka sejarah yang belum sembuh, serta menciptakan tekanan domestik terhadap pemerintah Korea Selatan untuk bersikap lebih tegas terhadap Jepang. Gerakan sosial seperti demonstrasi rutin di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul, kampanye boikot produk Jepang, dan desakan untuk meninjau ulang kerja

sama militer seperti *GSOMIA* (General Security of Military Information Agreement) merupakan respons nyata dari masyarakat sipil atas kegagalan penyelesaian isu ini secara adil.

Dengan demikian, penyelesaian isu *comfort women* tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan legal-formal semata, melainkan memerlukan pengakuan simbolik dan empatik atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Isu ini tidak hanya mencerminkan persoalan bilateral antara dua negara, tetapi juga menjadi ujian moral bagi komunitas internasional dalam menghadapi kejahatan perang dan memperjuangkan keadilan historis.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses pengolahan data yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian kualitatif, konsep dasar penelitian tidak mengharuskan adanya perhitungan matematis.

Burhan Bungin (2007) dalam bukunya "*Penelitian Kualitatif*" menjelaskan bahwa penelitian sosial dengan format kualitatif-deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menyederhanakan, dan menganalisis fenomena sosial yang ada di masyarakat, yang menjadi objek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan analisis dokumen. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, majalah, serta dengan menganalisis dokumen resmi dan teks untuk menemukan tema

atau pola yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian yang baik harus memiliki batasan ruang lingkup untuk memastikan penelitian dapat dibahas secara maksimal dan memudahkan peneliti dalam mencari sumber data serta menganalisisnya secara mendalam. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana dampak yang disebabkan dari tuntutan *Comfort Women* terhadap hubungan diplomatik Jepang – Korea Selatan dalam kurun waktu 2015 hingga 2022. Dalam kurun waktu ini terdapat berbagai peristiwa yang terjadi diantara kedua negara setelah ditandatangani Kesepakatan Jepang-Korea Selatan 2015.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada isu *Comfort Women* yang muncul setelah hampir 50 tahun terjadinya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang di beberapa negara yang pada penelitian ini peneliti hanya akan berfokus pada satu negara yaitu Korea Selatan. Dalam aspek historis, penelitian ini akan meneliti apa yang menjadi latar belakang isu *Comfort Women*, termasuk bagaimana praktik ini dimulai, konteks sosial dan politik selama penjajahan Jepang di Korea Selatan serta bagaimana perkembangan narasi sejarah *Comfort Women* di Korea Selatan dan Jepang dari waktu ke waktu.

Penelitian ini akan membahas peristiwa yang terjadi dari tahun 2015-2022, yang mana pada tahun ini sudah adanya pernyataan dalam penyelesaian isu ini, namun tuntutan dan pergerakan masih saja dilakukan oleh organisasi dan pendukung dari *comfort women* itu sendiri. Oleh sebab itu, adapun dampak dan hal-hal yang terjadi dalam masa tersebut akan peneliti paparkan

dalam bab pembahasan selanjutnya. Selain itu, peneliti juga akan mengkaji bagaimana isu ini mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara serta melihat peran organisasi internasional dan negara lain dalam menanggapi isu *Comfort Women* ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang *Comfort Women*

Jeonggun Wianbu (정군위안부) atau *Military Comfort Women* adalah istilah yang merujuk pada perempuan-perempuan yang dipaksa atau terpaksa bekerja sebagai budak seks bagi militer Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Melalui cara-cara koersif seperti penipuan, penculikan, dan intimidasi, perempuan yang mayoritas dari Korea direkrut untuk melayani kebutuhan seksual tentara Jepang dalam sistem yang dilembagakan secara militer.⁴ Sistem ini beroperasi sejak awal 1930-an hingga berakhirnya Perang Dunia II pada 1945.

Tradisi prostitusi militer telah ada sejak akhir abad ke-19 dalam bentuk *Karayuki-san*, yakni perempuan Jepang yang dikirim ke berbagai wilayah Asia untuk bekerja sebagai pekerja seks. Praktik ini berkaitan erat dengan proses modernisasi Jepang pasca-Restorasi Meiji (1868), yang menandai perubahan besar dalam struktur politik, militer, ekonomi, dan sosial. Reformis seperti Fukuzawa Yukichi bahkan mendorong emigrasi perempuan ke daerah-daerah koloni, termasuk sebagai *comfort women*. Pemerintah Jepang kemudian mengadopsi istilah "*Jugun Ianfu*" (*comfort women*) untuk

⁴ Ine Kusuma Aryani, ""*Comfort Women*" Korea Selatan, Karakter yang Terlupakan",

Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol 1 No 2, (Maret 2022), 111

menyebut sistem ini, yang didukung oleh regulasi medis dan lisensi formal.

Korea menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Setelah Jepang memenangkan Perang Tiongkok-Jepang (1894) dan Perang Rusia-Jepang (1905), Korea dianeksasi pada 1910 dan dijajah hingga 1945. Selama periode ini, sekitar 80% dari total *comfort women* berasal dari Korea, dengan estimasi jumlah korban mencapai 200.000 orang.⁵ Korban lain berasal dari Taiwan, Filipina, Indonesia, dan negara-negara jajahan Jepang lainnya.

Comfort station pertama didirikan di Manchuria sekitar Insiden Manchuria tahun 1931. Saat itu militer Jepang mulai membentuk sistem bordil militer sebagai strategi perang. Setelah Insiden Shanghai (1932) dan pembantaian Nanking (1937), jumlah *comfort station* meningkat drastis. Pembantaian yang mengakibatkan adanya korban perkosaan massal antara 20.000 hingga 80.000 perempuan Tiongkok inilah yang mendorong Jepang membentuk sistem terkontrol untuk mencegah kekerasan seksual tak terkendali, mengurangi penyebaran penyakit menular seksual, dan menjaga citra militer di mata dunia.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 400 *comfort stations* di seluruh Asia, dengan tiga jenis pengelolaan: langsung oleh militer, dikendalikan oleh militer meski secara formal milik swasta, dan dimiliki sipil namun bekerja sama dengan militer.⁶ Model

kedua paling umum dijumpai. Perempuan dalam sistem ini mengalami kekerasan fisik dan seksual yang ekstrem, infeksi, trauma psikologis, hingga kematian. Mereka diperiksa secara medis bukan untuk perlindungan, melainkan demi menjaga kesiapan militer Jepang.

Perekrutan *Comfort Women*

Pada Maret 1938, militer Jepang mulai merekrut dan mengawasi agen perekrutan perempuan untuk *Comfort Station*. Dua kategori agen terbentuk: pertama, individu yang ditunjuk langsung oleh militer, seperti pemilik rumah bordil di Tiongkok dan Korea; kedua, sub-kontraktor lokal seperti broker tenaga kerja dan agen prostitusi, yang umumnya terlibat dalam perdagangan perempuan.⁷ Selama kolonialisme Jepang (1910–1945), khususnya pada 1930-an, kemiskinan dan urbanisasi membuat perempuan Korea rentan dijebak atau dipaksa masuk sistem prostitusi negara.

Sebagian besar korban yang bersaksi direkrut saat remaja. Sistem prostitusi negara dan jaringan perdagangan perempuan mempermudah mobilisasi besar-besaran wanita Korea untuk dijadikan *Comfort Women*. Rekrutmen dilakukan melalui dua cara: mobilisasi resmi seperti *Yōjajōngsindae* (Korps Buruh Relawan Wanita), yang menyamar sebagai perekrutan tenaga kerja, dan melalui iklan tenaga kerja di surat kabar.⁸ Banyak perempuan tertipu janji

⁵ Min, P. G. (2003). *Korean "Comfort Women": The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class*. *Gender and Society*, 17, 938–957.

⁶ *ibid*

⁷ Stetz, M. D., & Oh, B. B. (2015). *Legacies of the comfort women of World War II*. Routledge. Hal 9

⁸ Yonson Ahn, "The Military 'Comfort Women': An Introduction" dalam *Whose Comfort? Body, Sexuality and Identities of Korean 'Comfort Women' and Japanese Soldiers during WWII* (Singapore: World Scientific Connect, 2019), https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/9789811206351_0001?srsId=AfmBOoq31Lvlf

pendidikan, pekerjaan bergaji tinggi, atau hidup yang lebih baik.

Guru sekolah dan otoritas lokal pun terlibat.⁹ Beberapa korban seperti Kim Ūnjin dan Kang Tökkyōng awalnya direkrut melalui sekolah, lalu dikirim ke *Comfort Station*. Iklan di surat kabar juga mencari perempuan sehat usia 18–30 untuk “bekerja” di fasilitas militer. Janji kehidupan baru sangat menggoda bagi perempuan miskin atau yang ingin melarikan diri dari patriarki keluarga. Sebagian perempuan berharap bisa memperoleh pendidikan atau hidup mandiri.¹⁰

Perekrutan juga didukung infrastruktur militer. Perempuan dibawa menggunakan truk, kapal, dan kereta militer yang memerlukan izin resmi, membuktikan keterlibatan langsung otoritas Jepang. Polisi dan tentara ikut serta, bahkan ada insentif bagi kepala sekolah yang berhasil mengirim banyak gadis.

Pada 6 Maret 1939, militer Jepang menerbitkan regulasi perekrutan *Comfort Women*. Mereka diwajibkan menjalani pemeriksaan penyakit menular setiap lima hari dan hanya diizinkan melayani jika lulus pemeriksaan.¹¹ Jadwal *Comfort Station* juga ditetapkan berdasarkan pangkat tentara. Perekrutan dilegalkan melalui UU Tenaga Kerja Sukarela Wanita (1944) walaupun praktik ini telah berlangsung sejak awal 1930-an. Meskipun pengakuan resmi baru muncul lewat Pernyataan Kōno 1993,

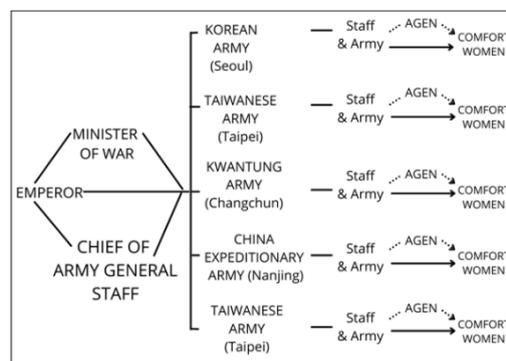
[IWk59nMWqVI81JwKqXr16_vgcdallut8Hir2-8GEfDF](#)

⁹ Ahn, Y. (2020). *Whose comfort? Body, sexuality and identities of Korean ‘comfort women’ and Japanese soldiers during WWII*.

¹⁰ Soh, C. Sarah. *The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan*. Britania Raya: University of Chicago Press, 2008.

keterlibatan negara dalam sistem *Comfort Women* sangat jelas sejak masa kolonial.

Struktur Organisasi dalam Sistem *Comfort Women*



Gambar 2.1 Struktur Organisasi dalam Sistem *Comfort Women*

Pendirian dan pelaksanaan sistem *Comfort Women* tidak terlepas dari peran pejabat tinggi Jepang. Terdapat tiga alasan utama pendirian sistem ini: pertama, untuk memberikan hiburan bagi tentara di waktu luang; kedua, mengurangi kasus pemerkosaan di masyarakat; ketiga, merekrut wanita muda dan belum menikah guna menghindari penyebaran penyakit menular seksual.

Ketiga alasan tersebut menjadi dasar pelaksanaan sistem *Comfort Women* secara terstruktur dan terorganisir.¹² Menteri Perang bertanggung jawab atas pembentukan sistem ini di setiap markas militer. Kaisar, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, turut berperan dalam pelaksanaannya. Setiap aktor dalam

¹¹ Prashernanda, H., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2022). *Analisa Transnational Advocacy Network: Transnasionalisme Redress Movement for Comfort Women di Negara Barat oleh The Korean Council 2015-2021*. *Journal of International Relations Diponegoro*, 8(3), 334-345.

¹² ibid

struktur organisasi sistem ini memiliki peran spesifik—aktor berpangkat tinggi sebagai perencana dan pengambil keputusan, sedangkan yang berpangkat rendah sebagai pelaksana.

Struktur organisasi diawali oleh Kaisar yang memberi wewenang kepada Menteri Perang dan Kepala Jenderal.¹³ Menteri Perang mengatur administrasi militer, seperti mengeluarkan izin penggunaan kapal untuk mengangkut *Comfort Women*, serta memberi instruksi pelaksanaan kepada staf dan markas tentara. Kepala Jenderal bertugas menyusun strategi perang dan memberi nasihat kepada Kaisar.

Di bawah mereka, Jenderal Umum (General Commander) bertanggung jawab penuh di wilayah pendudukan dan memberi perintah pendirian *Comfort Station*. Perintah ini diteruskan kepada staf senior dan junior. Staf senior merancang rencana pendirian, sementara staf junior melaksanakan pembangunan dan perekrutan perempuan.

Perekrutan dilakukan dengan dua cara: melalui agen pihak ketiga atau langsung oleh staf dan tentara Jepang yang bekerja sama dengan masyarakat lokal. Garis putus-putus dalam diagram menunjukkan keterlibatan pihak ketiga sebagai perekrut, bukan langsung dari tentara. Struktur ini menegaskan keterlibatan sistematis pejabat sipil dan militer Jepang dalam sistem *Comfort Women*.

UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENANGANI ISU *COMFORT WOMEN*

Selama masa perang, masyarakat Jepang hampir tidak menyadari keberadaan *Comfort Women*. Orang yang berperang mengetahuinya, tetapi isu ini tidak dilihat sebagai masalah sosial. Sekitar 1965, orang yang tertarik pada hubungan Jepang-Korea mulai menyadari bahwa keberadaan mereka adalah salah satu aspek tragis dari penjajahan Jepang.¹⁴ Namun, para korban hanya dianggap sebagai bagian dari sejarah.

Pada 1943, saat kampanye korps buruh sukarela di Korea diluncurkan, muncul desas-desus bahwa perempuan akan dijadikan wanita penghibur. Kantor Gubernur Jenderal membantahnya, namun bantahan tersebut justru memperkuat rumor. Ini menunjukkan bahwa sistem wanita penghibur telah dikenal luas pada 1945.

Setelah perang, isu ini tetap diam hingga menarik perhatian internasional. Wanita Korea menuntut Jepang atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Meski bukti banyak, masih ada penolakan pengakuan dari Jepang. Untuk mendapat kompensasi, Jepang harus mengakui keterlibatannya terlebih dahulu.¹⁵

Awal 1970-an, reporter Jepang Senda Kako menerbitkan “Jugun Ianfu” tentang prostitusi paksa oleh militer Jepang. Pada 1977, diterbitkan memoar Seiji Yoshida *My War Crimes: Abduction of Koreans*, yang menjelaskan perannya menculik perempuan Korea dengan bantuan

¹³ Ibid, hal 29

¹⁴ *Digital Museum The Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund*
<https://www.awf.or.jp/>

¹⁵ Joseph M.G. (2015) *Korean Comfort Women: How Japanese Military Expansion Within East Asia Led to Systematized Prostitution Between 1910 and 1945*. California State University, Chico. Hal 75

polisi Jepang. Yoshida mengaku merekrut 5.000 orang, termasuk 1.000 wanita, menggunakan kekerasan dan penipuan. Namun, ada celah dalam narasinya.

Setelah Korea Selatan mengalami demokratisasi pada 1987, isu ini dibahas terbuka oleh Yun Chung-Ok. Pada 1990, ia menerbitkan artikel di surat kabar *Hankyoreh* tentang wanita penghibur. Namun, karena Yun mengandalkannya sumber Yoshida yang kemudian dicabut, karyanya dipertanyakan.

Meskipun Yun memakai berbagai sumber, asosiasi dengan Yoshida membuat sebagian akademisi mendiskreditkan penelitiannya. Banyak peneliti lain juga terpengaruh Yoshida. Akibatnya, nasionalis Jepang menggunakannya untuk menyerang narasi wanita penghibur. Benar tidaknya pengakuan Yoshida menjadi tidak relevan karena dampaknya sudah besar terhadap advokasi dan historiografi.

Media Jepang kemudian menyorot kelemahan cerita Yoshida. Majalah *Shukan Shincho* menerbitkan artikel “A Plot May Exist behind the Escalation of This Comfort Women Issue” untuk meruntuhkan klaim Yoshida. Artikel ini mengutip Profesor Kunihiko Shin yang tidak menemukan bukti mendukung pernyataan Yoshida dan menyebut gagasan wanita penghibur sebagai lelucon.¹⁶

Pada 1991, gugatan Comfort Women Korea Selatan membawa isu ini ke perhatian global. Gugatan serupa datang dari wanita Filipina dan Taiwan. Namun, semua gugatan dari 1991

hingga 1992 ditolak pengadilan Jepang. Hingga kini, belum ada tuntutan Comfort Women yang dimenangkan di sistem hukum Jepang.

Penyampaian Kesaksian Korban *Comfort Women*

Kim Hak-sun adalah wanita Korea pertama yang secara publik memberikan kesaksian sebagai korban *comfort women* pada tahun 1991. Ia menceritakan bagaimana ia diculik saat remaja dan dipaksa melayani 7–8 tentara Jepang setiap hari di rumah bordil militer. Ia tinggal bersama perempuan lain dalam kondisi tak manusiawi dan penuh kekerasan. Meskipun berhasil melarikan diri setelah empat bulan, Kim mengalami trauma mendalam seumur hidup. Ia menikah dengan pria yang menyelamatkannya, namun hidupnya tetap dihantui stigma sosial. Kesaksiannya membuka jalan bagi korban lainnya untuk bersuara, menjadikannya simbol perjuangan untuk keadilan.

Pada tahun 1990, pemerintah Jepang menyangkal keterlibatan dalam sistem *comfort women*. Namun, iklim demokratisasi Korea mendorong pembahasan isu ini secara terbuka. Kesaksian Kim memicu pengakuan global dan menjadi titik balik dalam advokasi korban. Sejak 2018, 14 Agustus diperingati sebagai Hari Peringatan Nasional untuk *comfort women* di Korea Selatan.

Kesaksian lainnya, seperti Chong Ok Sun dan Hwang So Gyun, mengungkap penculikan, penyiksaan, dan perbudakan seksual yang dialami.¹⁷ Chong diculik saat berusia 13 tahun,

¹⁶ Alan Gamble and Takesato Watanabe. *A Public Betrayed: An Inside Look at Japanese Media Atrocities and their Warnings to the West*, (Washington DC: Regnery Publishing,

Inc. 2004), 334.

¹⁷ United Nations Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on Violence

diperkosa oleh polisi Jepang, kehilangan penglihatan, dan dipaksa melayani ribuan tentara. Hwang So Gyun ditipu dengan janji pekerjaan dan diperkosa oleh puluhan tentara setiap malam. Ia menyaksikan teman-temannya dibunuh jika melawan atau sakit.

Kim Ju Hwang juga mengira akan bekerja di pabrik, namun dipaksa melayani tentara. Ia mengalami pelecehan, disuntik agar tidak hamil, dan tak pernah menerima bayaran. Penderitaannya membekas dalam tubuh dan mentalnya sepanjang hidup.

Para penyintas menggambarkan sistem militer yang mengatur aktivitas seksual mereka secara ketat, termasuk jadwal, perintah, dan penggunaan kondom—semata untuk melindungi tentara, bukan para wanita. Meski menghadapi rasa malu dan pengabaian, kesaksian mereka menjadi bukti penting pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II.

Tuntutan Korban *Comfort Women* Kepada Pemerintah Jepang

Pernyataan para penyintas tentang kekerasan selama penjajahan Jepang menguatkan informasi tertulis yang diterima Pelapor Khusus, yang mempercayai bahwa sistem perbudakan seksual didirikan dan diatur secara sistematis oleh Tentara Kekaisaran Jepang, dengan komando militer dan sipil. Pelapor Khusus juga melihat bekas luka yang sesuai dengan kesaksian para korban. Dalam konsultasi dengan Dr. Cho Hung Ok, dokter yang merawat mantan *comfort women* di Pyongyang, ditegaskan bahwa para wanita tersebut mengalami

kondisi fisik dan psikologis yang lemah akibat pemerkosaan harian selama bertahun-tahun.¹⁸ Selain luka fisik, mereka mengalami penderitaan psikologis serius, seperti kurang tidur, mimpi buruk, tekanan darah tinggi, dan gangguan saraf. Banyak yang harus disterilkan akibat infeksi penyakit menular seksual.

Pelapor Khusus juga menanyakan solusi yang diinginkan para penyintas, termasuk sikap mereka terhadap tawaran Pemerintah Jepang melalui *Asian Peace and Friendship Fund for Women*. Mantan *comfort women* menyampaikan tuntutan konkret, yaitu:

(a) Permintaan maaf langsung dan individu dari Pemerintah Jepang kepada semua korban yang masih hidup. Di Korea Utara, permintaan maaf juga diminta kepada negara melalui pemerintah, sementara di Korea Selatan, korban menginginkan surat resmi yang ditandatangani. Permintaan maaf sebelumnya oleh Perdana Menteri Murayama dianggap tidak tulus karena belum disahkan oleh Diet Jepang.

(b) Pengakuan bahwa perekrutan sekitar 200.000 wanita Korea dan pendirian rumah bordil militer dilakukan secara sistematis dan paksa dengan sepengetahuan Pemerintah dan tentara Jepang.

(c) Pengakuan bahwa perekrutan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hukum humaniter internasional, kejahatan terhadap perdamaian, serta bentuk perbudakan, perdagangan orang, dan prostitusi paksa.

against Women, E/CN.4/1996/53/Add.1 (1996).

¹⁸ Ibid, hal 16

(d) Penerimaan tanggung jawab moral dan hukum atas kejahatan tersebut.

(e) Pembayaran kompensasi langsung dari sumber daya pemerintah. Pemerintah Jepang diminta membentuk undang-undang khusus untuk memungkinkan pengajuan klaim kompensasi secara hukum.

Para wanita menegaskan bahwa makna simbolis dari kompensasi lebih penting daripada jumlah uangnya.¹⁹ Mereka juga meminta agar Dana Perdamaian dan Persahabatan ditarik, karena dianggap sebagai cara Pemerintah Jepang menghindari tanggung jawab hukum atas kejahatan yang dilakukan negara.

The Korean Council for The Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan (The Korean Council)

Setelah kesaksian publik pertama dari penyintas Korea atas perbudakan seksual militer pada tahun 1991, *The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan* (The Korean Council) bersama para korban mengajukan petisi ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Pelapor Khusus PBB dan berbagai lembaga internasional lainnya, termasuk ICJ dan ILO, menyatakan bahwa sistem *comfort women* merupakan bentuk pemerkosaan sistematis dan perbudakan seksual, serta menuntut Jepang agar mengakui, menyelidiki, dan memberikan reparasi kepada para korban.

The Korean Council, yang berdiri pada 16 November 1990 sebagai koalisi individu dan 37 organisasi perempuan (banyak berafiliasi dengan

gereja Kristen), telah memperjuangkan keadilan bagi para korban sejak 1990. Dengan kampanye utamanya berupa *Wednesday Demonstration*, organisasi ini menarik dukungan nasional dan internasional. Tokoh pendirinya, Yoon Jung-ok dan Lee Hyo-jae, merupakan generasi pertama gerakan perempuan di Korea Selatan. Yoon Jung-ok, dosen di Ewha Womans University, memulai upaya awal untuk menekan pemerintah Korea dan Jepang menyelesaikan isu *comfort women*.

Hingga 2017, The Korean Council terdiri dari 19 organisasi, mulai dari kelompok gereja Protestan dan Katolik, hingga gerakan perempuan dan mahasiswa. Spektrum ideologinya luas, mencakup kelompok konservatif hingga progresif. Perwakilan tiap organisasi anggota aktif dalam majelis umum, sementara kegiatan sehari-hari dijalankan oleh komite eksekutif.

Organisasi ini memiliki tiga proyek utama.²⁰ Pertama, memberi tekanan kepada pemerintah Jepang untuk mengubah kebijakannya melalui *Wednesday Demonstration* di depan Kedutaan Jepang di Seoul, dan kerja sama internasional melalui forum seperti Asian Women's Network dan *International Tribunal for Women*. Kedua, memberikan dukungan langsung kepada para penyintas, termasuk mereka yang tinggal sendiri dan tidak memiliki pendamping. The Korean Council membentuk kelompok pendukung lokal dan terlibat dalam rumah seperti *House of Sharing*. Ketiga, menjalankan *War and Women's Human Rights Museum* di Seoul untuk edukasi dan pelestarian memori korban.

¹⁹ Ibid, hal 17

²⁰ Chang, W. (2017). Social Movements and Nationalism: *Comfort Women* Movement and

Narratives of Nation in Post-Democratization Korea, 1988-2007 (Doctoral dissertation).

Berbagai aksi simbolik turut dilakukan, seperti pendirian *Patung Perdamaian* pertama di depan Kedutaan Jepang tahun 2011 saat demonstrasi ke-1000.²¹ Patung tersebut melambangkan perjuangan, penderitaan, dan penantian para *comfort women*, serta bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai isu perbudakan seksual. Penggunaan nama “perdamaian” mencerminkan tujuan simbolik dari patung tersebut, yang merupakan bagian dari strategi *reframing* isu untuk membangun gerakan kolektif.

Inisiatif lain adalah *Butterfly Fund*, yang merupakan penggalangan dana untuk membantu perempuan korban kekerasan seksual di zona konflik seperti Uganda, Vietnam, Kongo, Palestina, Irak, dan Nigeria.²² Dana ini juga digunakan untuk memberangkatkan penyintas ke konferensi internasional seperti *Konferensi HAM Dunia di Vienna* dan *Asian Solidarity Forum*, serta seminar di berbagai kampus.

Dana tersebut juga digunakan untuk mendirikan Patung Perdamaian di Dresden (Jerman) dan Chicago (AS). Selain itu, The Korean Council memproduksi film dokumenter seperti *My Name is Kim Bok Dong*, yang ditayangkan pada acara internasional seperti UNHCR dan tur ke beberapa negara bagian AS.²³

Wednesday Demonstration, yang diadakan setiap hari Rabu, menjadi simbol kampanye publik untuk menuntut tujuh poin kepada Jepang,

termasuk permintaan maaf resmi, kompensasi, dan pengakuan sejarah. Slogan seperti “Meminta maaf!”, “Dihukum!”, dan “Ganti rugi!” merupakan simbolik politik yang membangun narasi gerakan.

Terakhir, The Korean Council menyelenggarakan program beasiswa dengan nama-nama penyintas, seperti *Kim Hak Sun Scholarship* dan *Lee-Soon Deok Scholarship*. Diversifikasi beasiswa bertujuan melahirkan generasi penerus gerakan dari berbagai bidang. Sebanyak 338 beasiswa telah diberikan sebagai bentuk pelestarian ingatan kolektif dan komitmen terhadap keadilan.

Wednesday Demonstration (Demonstrasi Rabu)

Wednesday Demonstration (수요집회/*Suyo Jiphoe*) adalah gerakan sosial mingguan yang dimulai pada Rabu, 8 Januari 1992, di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Aksi ini diprakarsai oleh *The Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery by Japan* sebagai bentuk protes terhadap kekejaman sistem *comfort women*, yakni perbudakan seksual militer oleh Jepang pada masa Perang Dunia II.

Demonstrasi berlangsung tiap Rabu pukul 12.00 siang selama satu jam.²⁴ Kegiatannya mencakup pembacaan pernyataan, pidato aktivis, pertunjukan musik, puisi, atau doa, serta membawa spanduk, poster, dan foto korban. Aksi dilakukan damai, tertib, dan konsisten,

²¹ *The Korean Council*. (2011). Join The 1000th Wednesday Demonstration. Global Action Day : Justice for *Comfort Women*. Diambil dari https://www.koreaverband.de/wp-content/uploads/2011/07/ComfortWomen_1000Dem_PR-from-Korea_Dec2011.pdf

²² Ibid, hal 145

²³ Ibid, hal 214

²⁴ Thomas C.Fox. Seoul rally draws attention to ‘*Comfort Women*’. <https://www.ncronline.org/blogs/ncr-today/seoul-rally-draws-attention-comfort-women?utm> (diakses pada 10 April 2025)

bahkan di tengah cuaca ekstrem atau pandemi. Wednesday Demonstration lahir dari kebutuhan memberi suara kepada para penyintas yang lama terpinggirkan, sambil menekan pemerintah Jepang untuk memenuhi tujuh tuntutan utama: pengakuan kejahatan perang, pengungkapan kebenaran, permintaan maaf resmi, reparasi hukum, hukuman bagi pelaku, pencatatan dalam buku sejarah, dan pembangunan tugu peringatan serta museum.

Dipilihnya hari Rabu bermula dari kunjungan PM Jepang Miyazawa ke Korea pada Jumat, 17 Januari 1992, sehingga Rabu sebelumnya menjadi momen paling dekat untuk menyampaikan tuntutan. Saat itu, hanya lima korban hadir. Namun sejak itu, demonstrasi terus berjalan tanpa jeda, meskipun jumlah penyintas semakin menurun.

Simbol penting gerakan ini adalah *Statue of Peace*, patung perunggu gadis muda yang duduk di depan Kedutaan Jepang, dipasang pertama kali tahun 2011 saat peringatan demonstrasi ke-1000. Patung ini menjadi simbol transnasional perlawanan dan telah direplikasi di berbagai negara. Kehadiran para *halmeoni* (nenek korban selamat), sering kali mengenakan hanbok atau syal kuning, menjadi pengingat hidup atas sejarah yang belum selesai.

Saat pandemi COVID-19, demonstrasi beralih ke bentuk daring melalui siaran langsung dan pemasangan simbol visual.²⁵ Adaptasi

ini menunjukkan keteguhan gerakan dalam menyuarakan keadilan. Aksi ini kini menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Korea, diajarkan di sekolah, dan disaksikan oleh wisatawan internasional. Tekanan dari Wednesday Demonstration turut menjaga isu *comfort women* tetap hidup dalam ruang publik dan diplomasi global.

Meski Jepang pernah menyampaikan permintaan maaf, korban menilai isinya kurang tulus karena tidak disertai pengakuan hukum. Tuntutan agar Jepang mengakui secara resmi pelanggaran ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan terus disuarakan melalui berbagai forum internasional. Komite CEDAW, Dewan HAM PBB, dan Pelapor Khusus PBB telah mendesak permintaan maaf resmi dan reparasi penuh.²⁶

Gerakan ini didukung secara global, dengan patung *Statue of Peace* dipasang di AS, Jerman, Kanada, dan Australia. Komunitas diaspora Korea juga aktif melobi parlemen di negara mereka, menghasilkan resolusi seperti Resolusi DPR AS No. 121 (2007) yang menuntut Jepang meminta maaf. Media global seperti *BBC*, *NYT*, dan *The Guardian* turut memberi sorotan, sementara organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mendokumentasikan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat dan mendesak penerapan keadilan transisional oleh Jepang.²⁷

²⁵ Jung, H. (2021). "Digital Protest in Pandemic Era: Wednesday Demonstration Online." *Korean Journal of Civic Movements*.

²⁶ United Nations. (1996). Report on the mission to the Democratic People's Republic of Korea, the Republic of Korea and Japan on the issue of military sexual slavery in wartime.

UN Commission on Human Rights.

²⁷ Amnesty International. (2005). Still Waiting After 60 Years: Justice for Survivors of Japan's Military Sexual Slavery System.

<https://www.amnesty.org>

ANALISIS DAMPAK TUNTUTAN COMFORT WOMEN TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK JEPANG – KOREA SELATAN

Isu *Comfort Women* adalah salah satu warisan sejarah paling kontroversial yang terus membayangi hubungan Korea Selatan dan Jepang. Istilah ini merujuk pada perempuan, terutama dari Korea, yang dipaksa menjadi budak seksual oleh militer Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Isu ini melibatkan aspek hak asasi manusia, sejarah, politik luar negeri, dan identitas nasional kedua negara.

Konflik muncul karena dua dimensi utama: pengakuan sejarah dan tanggung jawab moral serta hukum. Korea Selatan menilai Jepang belum sepenuhnya mengakui kejahatan masa lalunya. Trauma ini masih membekas, terutama bagi para penyintas dan masyarakat Korea yang mewarisi ingatan kolektif tersebut.

Sejak Kim Hak-sun memberikan kesaksian publik pertama pada 1991, isu ini mendapat perhatian internasional. Masyarakat sipil Korea mendorong pengakuan dan reparasi dari Jepang. Kesaksian para penyintas mengungkap praktik perbudakan seksual sistematis dan brutal, di mana korban dipaksa melayani puluhan tentara setiap hari dalam kondisi penyiksaan. Fakta ini menjadi dasar moral tuntutan permintaan maaf resmi dan kompensasi.

Namun, alih-alih meredakan ketegangan, respons Jepang yang dianggap tidak memadai sering kali memperkeruh situasi dan memicu kecaman lebih luas, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Isu *Comfort Women* menjadi sumber ketegangan diplomatik kronis antara Korea Selatan dan Jepang, meskipun keduanya adalah sekutu strategis AS. Korea Selatan menilai Jepang belum sepenuhnya mengakui dan bertanggung jawab atas praktik perbudakan seksual yang dilakukan militer Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II. Pernyataan Kono 1993 sempat menjadi dasar pengakuan, namun diragukan kembali saat Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri.

Pada masa jabatan pertamanya (2006–2007), Abe berusaha menyangkal tanggung jawab negara atas sistem *Comfort Women*, termasuk memasang iklan di *The Washington Post*, yang memicu kritik dan resolusi dari Kongres AS. Setelah kembali menjabat pada 2012, ia memerintahkan penyelidikan terhadap Pernyataan Kono, memicu kekhawatiran akan pencabutan permintaan maaf resmi. Meski secara formal tidak mencabut pernyataan tersebut, pemerintahannya aktif mereduksi maknanya dan berupaya mengubah narasi sejarah di media dan pendidikan.

Pidatonya di Kongres AS pada 2015 dan pidato 70 tahun akhir perang juga tidak memberikan permintaan maaf eksplisit, menimbulkan kritik luas dari Korea Selatan dan Tiongkok. Abe menyatakan penyesalan, namun menegaskan generasi mendatang tidak perlu terus meminta maaf atas masa lalu.

Pernyataan-pernyataan Abe memperburuk persepsi publik dan memicu perdebatan domestik di Jepang antara kalangan revisionis dan mereka yang menuntut tanggung jawab sejarah. Kritik internasional, termasuk dari PBB, menilai pendekatannya

melemahkan rekonsiliasi dan upaya pendidikan sejarah. Secara keseluruhan, sikap Abe mencerminkan kecenderungan revisionisme yang menghambat pengakuan atas kejahatan masa lalu dan memperkeruh hubungan Jepang–Korea Selatan.

Kesepakatan antara Jepang dan Korea Selatan terkait isu Comfort Women pada 28 Desember 2015 merupakan hasil dari proses negosiasi panjang yang dipengaruhi oleh faktor domestik, tekanan geopolitik, dan kebutuhan rekonsiliasi sejarah. Diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung-se, serta dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Park Geun-hye, kesepakatan ini menyatakan bahwa isu Comfort Women diselesaikan secara “final dan tidak dapat diubah kembali.”

Sebelum tercapainya kesepakatan, kedua negara menggelar beberapa pertemuan, termasuk di sela Konferensi Keamanan Nuklir di Den Haag, serta dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Trilateral dengan China.²⁸ Dalam pertemuan bilateral pertama di Seoul pada November 2015, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian isu Comfort Women. Diskusi dibagi menjadi dua sesi: kelompok kecil dan kelompok besar, membahas kerja sama keamanan, ekonomi, serta langkah menyelesaikan isu sejarah.

Selain di tingkat pemimpin negara, negosiasi juga dilakukan secara tertutup melalui 12 kali pertemuan

Direktur Jenderal sejak April 2014 hingga Desember 2015. Pembicaraan ini sempat stagnan karena perbedaan pandangan, hingga akhirnya dilakukan Konsultasi Tingkat Tinggi antara pejabat yang memiliki akses langsung ke kepala negara. Dalam pertemuan ini, Korea Selatan mengajukan tuntutan seperti pengakuan tanpa syarat, permintaan maaf resmi, serta penggunaan anggaran negara Jepang untuk membentuk yayasan bagi korban.

Pada April 2015, perjanjian sementara berhasil dicapai mencakup permintaan maaf, tanggung jawab, dan dana kompensasi dari Jepang, serta komitmen kedua negara untuk tidak saling mengecam di forum internasional. Meski sempat muncul perdebatan soal penghapusan istilah “tidak dapat diubah lagi,” pemerintah Korea Selatan akhirnya menerima redaksi tersebut.

Kesepakatan final diumumkan pada 28 Desember 2015, disertai pernyataan resmi kedua Menteri Luar Negeri. Jepang menyatakan keterlibatan militer dalam pelanggaran terhadap perempuan sebagai tindakan yang melukai harkat dan martabat. Perdana Menteri Abe menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan mendalam, disertai komitmen memberikan dana 1 miliar yen untuk membentuk yayasan di Korea Selatan.²⁹ Sebagai bentuk timbal balik, Korea Selatan menyatakan akan menangani isu patung peringatan Comfort Women di depan Kedubes Jepang secara bijaksana dan

²⁸ BBCIndonesia. (2014). Pertemuan Pertama Pemimpin Jepang dan Korea. Diambil kembali dari [bbc.com](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140321_jepang_korsel_bertemu): http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140321_jepang_korsel_bertemu

²⁹ Panda, A. (2017). The 'Final and Irreversible'

2015 JapanSouth Korea Comfort Women Deal Unravels. Diambil kembali dari [thediplomat.com](https://thediplomat.com/2017/01/the-final-andirreversible-2015-japan-south-korea-comfort-womendeal-unravels/): <https://thediplomat.com/2017/01/the-final-andirreversible-2015-japan-south-korea-comfort-womendeal-unravels/>

berkomitmen untuk tidak mengangkat isu ini kembali dalam forum internasional.

Kesepakatan ini mencerminkan niat baik kedua negara untuk menyelesaikan persoalan sejarah. Namun, penerimaannya di Korea Selatan tidak sepenuhnya positif. Tantangan utama bagi Presiden Park adalah memastikan implementasi kesepakatan dengan melibatkan kelompok korban, LSM, serta oposisi dalam negeri. Jika berhasil, kesepakatan ini dapat menjadi fondasi rekonsiliasi sejarah dan membuka jalan bagi penguatan hubungan bilateral, termasuk kerja sama trilateral dengan Amerika Serikat.

Secara substansial, poin utama kesepakatan mencakup: pengakuan tanggung jawab Jepang, permintaan maaf resmi dari Abe, kompensasi dana untuk penyintas, dan komitmen kedua pihak untuk tidak lagi membawa isu ini ke ranah internasional. Kedua negara juga sepakat menjaga hubungan diplomatik ke depan tanpa dibayangi oleh konflik sejarah tersebut.

Keberadaan *Statue of Peace* di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul menjadi simbol visual ketegangan diplomatik berkepanjangan antara Jepang dan Korea Selatan.³⁰ Didirikan tahun 2011 oleh *The Korean Council*, patung ini memperingati demonstrasi ke-1000 hari Rabu oleh para penyintas dan aktivis.³¹ Representasi seorang gadis muda duduk dengan ekspresi tenang, kaki menggantung, dan seekor burung di bahu, menjadikannya penghormatan kepada para *Comfort Women*. Setiap elemen dari patung ini

mengandung makna simbolik—rambut pendek melambangkan masa kanak-kanak yang dirampas, tangan terkepal menunjukkan tekad menuntut permintaan maaf, kaki tidak menyentuh tanah menandakan mereka tak bisa kembali ke rumah, dan kursi kosong melambangkan korban yang telah meninggal serta undangan kepada generasi mendatang untuk melanjutkan perjuangan.

Letaknya yang strategis di depan Kedutaan Jepang memberi dampak politis, menjadi pengingat publik terhadap sejarah kolonial. Pada Desember 2016, replika patung ditempatkan di depan Konsulat Jepang di Busan, memicu reaksi keras dari pemerintah Jepang hingga penarikan sementara Duta Besar dan Konsul Jenderal. Patung ini pun menyebar secara transnasional ke Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Australia, menjadikannya simbol global perjuangan hak asasi manusia dan keadilan historis.

Jepang menentang keras keberadaan patung ini, menganggapnya sebagai hambatan dalam membangun hubungan masa depan dan sebagai pemicu luka sejarah pasca-kesepakatan 2015. Permintaan Jepang agar patung dipindahkan disampaikan secara formal dalam nota diplomatik dan forum bilateral. Namun, Korea Selatan menolak karena patung itu dibangun oleh masyarakat sipil dan penghapusannya dinilai melanggar kebebasan berekspresi. Ini menunjukkan perbedaan pandangan antara Jepang yang ingin memisahkan sejarah dari diplomasi, dan Korea Selatan yang melihat penyelesaian

³⁰ Yamaguchi, M. (2014). *Comfort Women Statues and Japan's Image*. Japan Times, August 13.

³¹ Soh, C. S. (2008). *The Comfort Women*:

Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan. University of Chicago Press.

sejarah sebagai syarat hubungan bermartabat.

Patung ini telah berkembang menjadi simbol resistensi kolektif yang menolak amnesia sejarah yang disponsori negara. Di Amerika Serikat, patung di Glendale sempat digugat oleh warga keturunan Jepang, namun gugatan ditolak pengadilan karena alasan kebebasan sipil. Isu patung juga mempengaruhi kerja sama bilateral, dengan pembatalan kunjungan kenegaraan karena tekanan domestik yang berkaitan dengan simbol ini.

Dalam kacamata konstruktivisme, patung bukan artefak pasif melainkan aktor normatif yang memengaruhi identitas dan kebijakan luar negeri. Ia memperkuat narasi korban dan membingkai Jepang sebagai negara yang belum memenuhi tanggung jawab sejarahnya. Di tingkat lokal, patung ini menjadi pusat edukasi generasi muda tentang sejarah dan aktivisme. Demonstrasi mingguan memperkuat memori kolektif dan memperlihatkan keberlanjutan gerakan sosial berbasis keadilan.

Ketegangan Ekonomi Bilateral Antara Jepang dan Korea Selatan

Treaty on Basic Relations between Japan and South Korea yang ditandatangani pada Juni 1965 menandai dimulainya hubungan diplomatik resmi kedua negara dan membuka kerja sama lintas sektor. Meskipun menyimpan masa lalu kelam, normalisasi hubungan ini

memberi ruang bagi interaksi yang lebih konstruktif.

Sejak 1965 hingga akhir 1980-an, Korea Selatan sangat bergantung pada Jepang, terutama dalam perdagangan, dengan sekitar 35% total impornya berasal dari Jepang.³² Namun, Korea Selatan kemudian tumbuh menjadi pemimpin industri semikonduktor global, dipelopori perusahaan seperti Samsung dan SK Hynix yang kini menguasai 60% pasar global.³³ Sebaliknya, industri semikonduktor Jepang mengalami penurunan pada 1990-an setelah digugat AS di WTO atas praktik dumping, meski tetap menjadi eksportir utama peralatan semikonduktor pada 2014–2018.³⁴

Ketegangan muncul saat Jepang mengumumkan pembatasan ekspor tiga bahan penting semikonduktor ke Korea Selatan pada 1 Juli 2019. Kebijakan ini mengubah sistem lisensi massal menjadi lisensi individual dan diterapkan secara resmi pada 4 Juli. Ketiga bahan tersebut meliputi fluorinated polyimide, photoresist, dan hydrogen fluoride—yang sangat vital bagi industri semikonduktor Korea Selatan. Ketergantungan Korea terhadap Jepang dalam bahan-bahan ini mencapai 94% untuk fluorinated polyimide, 92% untuk photoresist, dan 46% untuk hydrogen fluoride. Dampaknya sangat signifikan terhadap ekonomi Korea, karena sektor terkait menyumbang 20% dari total ekspor dan 0,7% PDB.³⁵

³² Tsuraya, Z. S. (2023). Upaya korea selatan dalam impor bahan kimia semikonduktor pada masa pembatasan ekspor jepang tahun 2019. 11(1), 198–208

³³ Dumas, L. (2021). Japan-south korea's rivalry: March

³⁴ Nurbaiti, L. (2021). Kepentingan Jepang Membatasi Ekspor Bahan Baku Semikonduktor

Ke Korea Selatan. *Jom Fisip*, 8(1), 1–23.

³⁵ Asih, K. N., & Suksmonohadi, M. (2019).

Ketegangan Jepang-Korea Selatan dan Dampaknya Pada Perekonomian. *Bank Indonesia*, 3(i), 113–117.

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ekonomi-keuangan-kerjasamainternasional/Documents/8.Bab_5_A

Jepang juga menurunkan status Korea dari daftar “white countries” ke kelompok B, yang mempersulit prosedur ekspor.³⁶ Ini menyebabkan penurunan ekspor Jepang ke Korea Selatan: 22,5% untuk poliamida, 11,6% untuk photoresist, dan 85,9% untuk hydrogen fluoride.

Alasan Jepang adalah keamanan nasional, menyebut dugaan kebocoran bahan kimia ke Korea Utara. Namun, langkah ini dianggap bermuatan politis, sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada 2018 yang memerintahkan perusahaan Jepang, seperti Mitsubishi dan Nippon Steel, membayar kompensasi korban kerja paksa masa perang.³⁷

Jepang berpendapat bahwa putusan tersebut melanggar *Treaty of 1965*, khususnya Pasal 2, yang menyatakan seluruh klaim telah diselesaikan.³⁸ Sebaliknya, Korea Selatan menilai bahwa hak korban atas kompensasi tetap berlaku. Tanggapan Korea termasuk mencabut Jepang dari daftar mitra dagang utama (12 Agustus 2019), menurunkan suku bunga acuan, serta memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi akibat penurunan ekspor hingga 11%.³⁹

Korea Selatan juga mengadukan kebijakan Jepang ke WTO karena dianggap melanggar prinsip perdagangan bebas dan mengganggu rantai pasok global. Akibat konflik ini, Korea Selatan memutuskan untuk tidak

memperpanjang perjanjian keamanan *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) pada 2019.

Konflik dagang ini mencerminkan kemunduran hubungan diplomatik dan menghidupkan kembali luka sejarah. Meski isu sejarah tidak selalu memengaruhi kebijakan langsung, sentimen anti-Jepang tetap memainkan peran penting dalam politik domestik kedua negara. Sengketa perdagangan ini memperlihatkan bahwa persoalan sejarah tetap menjadi batu sandungan dalam hubungan Jepang–Korea Selatan.

Sentimen Anti Jepang oleh Masyarakat Korea Selatan

Warisan kolonialisme Jepang, khususnya isu *Comfort Women*, meninggalkan trauma mendalam dan memicu kemarahan kolektif, terutama di Korea Selatan dan Tiongkok. Dampak psikososial dari sejarah tersebut melahirkan sentimen anti-Jepang yang masih terus mewarnai hubungan bilateral, terutama dalam bentuk boikot terhadap produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan.

Sejak Juli 2019, terjadi gelombang boikot besar-besaran terhadap produk asal Jepang, yang dimotori kampanye publik “No Japan”. Kampanye ini menyebar luas melalui media sosial dan ruang publik. Restoran dan pengemudi taksi menolak melayani wisatawan Jepang, dan muncul aplikasi ponsel

[rtikel.3.19.pdf](#)

³⁶ Op.cit, Tsuraya

³⁷ VoA. (2023). Pengadilan Korsel Perintahkan 2 Perusahaan Jepang Beri Kompensasi Lebih Besar pada Korban Kerja Paksa. VoA Indonesia.

<https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-korsel-perintahkan-2-perusahaan-jepang-beri-kompensasi-lebih-besar-pada-korban-kerjapaksa/7406930.html>

³⁸ MoFA. (2020). Ministry of Foreign Affairs, Japan 2 0 2 0 DIPLOMATIC B L U E B O O K. <https://www.mofa.go.jp/files/100116875.pdf>

³⁹ Mangkuto, W. S. (2019). Kronologi Perang Dagang Jepang-Korea, Dari Luka Perang Dunia. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190829133707-4-95656/kronologiperang-dagang-jepang-korea-dari-luka-perang-dunia/3>

yang membantu masyarakat mengenali produk-produk Jepang untuk diboikot.

Gerakan ini memunculkan lebih dari 2.400 unggahan di media sosial dengan tagar #BoycottJapan, mencerminkan protes terhadap kebijakan Jepang. Boikot tersebut berdampak nyata, ditandai dengan penurunan pembelian produk seperti Uniqlo yang digantikan oleh merek lokal seperti SPAO, serta keputusan banyak warga Korea untuk tidak lagi berwisata ke Jepang.⁴⁰

Boikot meluas ke berbagai sektor, termasuk industri pakaian, otomotif, dan minuman beralkohol. Penjualan produk seperti kendaraan Honda dan Toyota serta bir Jepang mengalami penurunan signifikan. Sejumlah swalayan menarik produk Jepang dari rak mereka. Gerakan ini bahkan merambah ke sektor budaya, dengan pemboikotan terhadap film dan literatur Jepang seperti *Doraemon*, *Detective Conan*, *Butt Detective the Movie*, dan *Shinchan*. Di sektor pariwisata, terjadi pembatalan tiket dan penurunan kunjungan ke Jepang secara drastis.

Kampanye "No Japan" muncul dalam konteks ketegangan perdagangan antara Jepang dan Korea Selatan pada periode 2018–2020.⁴¹ Di baliknya terdapat kekecewaan masyarakat terhadap penolakan perusahaan-perusahaan Jepang memberi kompensasi kepada korban kerja paksa semasa penjajahan. Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk penyangkalan atas tanggung jawab sejarah Jepang.

Secara politik, hal ini menempatkan Jepang dalam posisi dilematis. Di satu sisi, Jepang ingin mempertahankan citra sebagai negara modern dan berpengaruh. Di sisi lain, penolakan untuk mengakui dan menyelesaikan isu-isu simbolik masa lalu—seperti desakan penghapusan patung *Statue of Peace*—memperkuat persepsi negatif publik Korea Selatan. Penolakan tersebut dianggap tidak empatik, memperburuk krisis kepercayaan dan memperkuat sentimen anti-Jepang di masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan diplomatik modern tidak hanya ditentukan oleh perjanjian resmi, tetapi juga oleh legitimasi moral dan sensitivitas terhadap memori historis. Ketika Jepang gagal membangun narasi sejarah yang diterima bersama, maka kerentanan terhadap aksi boikot dan ketegangan diplomatik akan terus muncul kembali.

Dalam perspektif konstruktivisme, kasus ini menegaskan peran penting memori kolektif dalam membentuk identitas nasional dan arah kebijakan luar negeri. Korea Selatan, sebagai negara demokratis dengan tekanan publik yang kuat, merespons ketegangan sejarah melalui diplomasi simbolik dan mobilisasi masyarakat sipil. Gerakan boikot ini adalah bentuk artikulasi publik terhadap memori masa lalu yang belum tuntas.

Kerugian yang dialami Jepang mencerminkan bahwa kekuatan simbolik seperti memori, patung, dan aksi kolektif dapat memiliki dampak sebesar kekuatan formal dalam

⁴⁰ Rahma, D. (2019). *Dampak Boikot Produk Jepang oleh Warga Korea Selatan*. *Jurnal Hubungan Internasional Asia Timur*, 11(2), 105–117

⁴¹ Nurbaiti, I. (2021). *Perdagangan dan Politik: Konflik Ekonomi Korea Selatan–Jepang 2018–2020*. Jakarta: Pustaka Internasional.

dinamika hubungan internasional. Dalam konteks ini, aksi boikot bukan sekadar konsumsi yang ditanggihkan, melainkan bagian dari perjuangan memori dan keadilan historis yang belum selesai.

General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)

Kerja sama intelijen internasional umumnya dilakukan secara bilateral karena sifat informasinya yang sensitif. Dua bentuk utama kerja sama ini adalah model kolaboratif, di mana kedua negara berbagi penuh dalam pengumpulan dan analisis data, dan model terbatas, yang hanya mencakup pertukaran hasil akhir intelijen tanpa mengungkapkan sumber atau metode. *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)* antara Korea Selatan dan Jepang merupakan contoh model terbatas ini, yang memungkinkan pertukaran informasi militer rahasia terkait ancaman dari Korea Utara.

Menurut *Defense White Paper* 2016, GSOMIA memberi dasar hukum pertukaran informasi militer antar kedua negara dan melindungi kerahasiaan data yang dibagikan.⁴² Perjanjian ini juga mencerminkan komitmen Korea Selatan dalam kerja sama keamanan global, mengingat mereka memiliki perjanjian serupa dengan 33 negara dan NATO. Selain kedekatan geografis, kecanggihan sistem intelijen Jepang seperti SIGINT, ELINT, dan jaringan JUDGE menjadikan Jepang mitra strategis penting.

Namun, GSOMIA mengalami tantangan domestik. Penandatanganannya yang awalnya dijadwalkan pada Juni 2012 ditunda akibat penolakan publik. Kelompok konservatif menilai Jepang belum menebus kejahatan masa lalunya, sementara kaum liberal menolak karena proses yang tidak transparan. Penolakan ini mencerminkan sensitivitas sejarah kolonial Jepang, termasuk isu *Comfort Women*.

Akhirnya, GSOMIA ditandatangani pada 23 November 2016 di bawah Presiden Park Geun-Hye. Meskipun survei Gallup Korea menunjukkan sekitar 60% masyarakat menolak perjanjian ini, Park tetap melanjutkannya demi keamanan nasional. Ia menilai kerja sama dengan Jepang dalam GSOMIA penting untuk membentuk kesiapan pertahanan regional.⁴³

Namun, pada 22 Agustus 2019, Korea Selatan mengumumkan penghentian perjanjian ini melalui saluran diplomatik, sesuai ketentuan 90 hari pemberitahuan. Alasannya adalah memburuknya hubungan bilateral akibat sejumlah konflik: pertama, persoalan sejarah seperti kerja paksa dan *Comfort Women*; kedua, keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan yang memerintahkan perusahaan Jepang memberi kompensasi; ketiga, kebijakan Jepang menghapus Korea dari daftar mitra dagang tepercaya dan pembatasan ekspor bahan industri penting; keempat, meningkatnya ketegangan keamanan regional akibat aktivitas militer Tiongkok dan Rusia.

⁴² Ministry of National Defense Republic of Korea. (2016). 2016 Defense White Paper. Seoul: Ministry of National Defense Republic of Korea.

⁴³ Sangbo, P. (2016). *Implications of the*

General Security of Military Information Agreement for South Korea. Stimson <https://www.stimson.org/2016/implications-general-security-military-information-agreement-south-korea/>

Keputusan Korea Selatan membatalkan GSOMIA menandakan kekecewaan terhadap sikap Jepang, yang dinilai tidak transparan dalam kebijakan perdagangan dan tidak sensitif terhadap sejarah. Dalam perspektif konstruktivisme, tindakan ini mencerminkan bagaimana identitas dan memori historis memengaruhi kebijakan luar negeri. Korea Selatan merasa GSOMIA tidak lagi bermanfaat bila isu fundamental tidak diselesaikan.

Dalam periode 2015–2022, *The Korean Council* berperan penting sebagai aktor non-negara dalam memperjuangkan keadilan bagi penyintas *Comfort Women*. Mereka menolak perjanjian 2015 yang dinilai mengabaikan kepentingan korban, dan menggalang tekanan publik melalui demonstrasi, pemasangan patung perdamaian, serta advokasi di forum internasional seperti PBB dan UNESCO. Isu *Comfort Women* pun berkembang menjadi bagian dari diskursus hak asasi manusia global.

Puncak pengaruh mereka terlihat dalam keberhasilan membubarkan Yayasan Rekonsiliasi pada 2018 dan mendampingi gugatan hukum korban yang memperkeruh hubungan ekonomi dan diplomatik Jepang–Korea pada 2019. Meskipun sempat terdampak skandal internal pada 2020, organisasi ini bangkit dengan pendekatan edukatif, melibatkan generasi muda, dan membangun solidaritas regional. Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada 2022 yang memerintahkan kompensasi dari Jepang menandai kemenangan moral dan hukum.

Secara keseluruhan, *The Korean Council* menunjukkan bahwa aktor non-negara dapat memainkan peran strategis dalam politik internasional

melalui simbolisme, tekanan moral, dan mobilisasi memori kolektif, sebagaimana diteorikan dalam konstruktivisme.

ANALISIS TUNTUTAN KEADILAN BAGI COMFORT WOMEN TERHADAP DINAMIKA HUBUNGAN DIPLOMATIK JEPANG – KOREA SELATAN

Konstruktivisme Menurut Duncan Bell

Pendekatan konstruktivisme dalam hubungan internasional menekankan bahwa identitas, norma, dan makna sosial membentuk kepentingan serta perilaku negara. Salah satu varian pentingnya adalah konstruktivisme historis oleh Duncan Bell yang menyoroti peran memori kolektif dalam membentuk orientasi politik dan kebijakan luar negeri. Dalam konteks Jepang–Korea Selatan, memori kolektif atas penjajahan Jepang dan eksploitasi seksual terhadap perempuan Korea sebagai *Comfort Women* menjadi elemen sentral yang memengaruhi persepsi dan respons kedua negara.

Menurut Bell, memori kolektif bukan hanya catatan masa lalu, melainkan narasi historis yang direproduksi untuk membentuk identitas politik. Di Korea Selatan, narasi penderitaan korban *Comfort Women* menjadi bagian dari konstruksi identitas nasional sebagai korban kolonialisme Jepang. Narasi ini direproduksi melalui pendidikan, demonstrasi seperti *Wednesday Demonstration*, monumen seperti *Statue of Peace*, dan media massa. Isu *Comfort Women* pun menjadi simbol politik dan identitas nasional, bukan sekadar isu HAM.

Memori kolektif ini memengaruhi kebijakan luar negeri Korea terhadap

Jepang. Kesepakatan 2015 yang menyatakan penyelesaian isu *Comfort Women* secara "final dan tidak dapat diubah" ditolak luas oleh publik Korea. Pemerintahan Presiden Moon Jae-in menilai kesepakatan ini cacat karena tidak merepresentasikan suara korban. Hal ini menunjukkan bagaimana memori kolektif dapat bertentangan dengan kepentingan diplomatik, dan bahwa legitimasi kebijakan luar negeri sangat bergantung pada kesesuaian dengan ingatan bersama masyarakat.

Memori ini juga berdampak pada kerja sama keamanan. *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) yang ditandatangani tahun 2016 nyaris dibatalkan oleh Korea Selatan pada 2019 karena tekanan publik yang menilai Jepang tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan isu sejarah. Meski GSOMIA bertujuan menangani ancaman Korea Utara, memori kolonial tetap menjadi variabel penting.

Melalui konstruktivisme historis Bell, konflik diplomatik Jepang–Korea bukan semata kalkulasi rasional, melainkan hasil dari narasi sejarah dalam memori kolektif yang mengonstruksi batas-batas kerja sama kontemporer.

Gerakan Sosial (Social Movement) Menurut Charles Tilly

Tuntutan keadilan atas isu *Comfort Women* memengaruhi hubungan Jepang–Korea Selatan karena didorong oleh gerakan sosial, terutama oleh organisasi *The Korean Council*, serta dukungan internasional. Beberapa negara turut menyuarakan isu ini demi keadilan bagi para penyintas. Dalam *Social Movements, 1768–2004*,

dijelaskan bahwa gerakan sosial yang bersifat politis dan penuh konflik perlu dipahami secara historis. Sejarah menjelaskan evolusi strategi gerakan, seperti aksi unjuk rasa yang terorganisir, staf profesional, dan pendanaan yang kuat, serta perubahan kondisi politik yang memungkinkan gerakan muncul. Hilangnya gerakan sosial menunjukkan lemahnya partisipasi politik publik.

Charles Tilly mendefinisikan gerakan sosial sebagai serangkaian tindakan kolektif yang terorganisir dan berkelanjutan untuk perubahan sosial. Ia menyebutnya sebagai *contentious politics* — klaim masyarakat terhadap otoritas melalui aksi publik. Tilly mengidentifikasi tiga elemen utama gerakan sosial: *campaigns* (kampanye), *repertoire of contention* (repertoar kontensi), dan *WUNC displays* (Worthiness, Unity, Numbers, Commitment).⁴⁴

Konsep WUNC sering disampaikan lewat simbol budaya. *Worthiness* ditunjukkan melalui sikap sopan dan kehadiran figur publik; *Unity* melalui atribut seragam dan kegiatan kolektif; *Numbers* dari keramaian aksi dan dukungan massa; serta *Commitment* melalui aksi tahan cuaca dan partisipasi kelompok rentan.

Dalam kasus *Comfort Women*, ketiga elemen ini tampak jelas:

a. Campaigns: Tuntutan kepada pemerintah Jepang untuk mengakui dan bertanggung jawab atas kejahatan perang dilakukan secara konsisten oleh *The Korean Council*, baik lewat diplomasi, hukum, maupun media publik.

⁴⁴ Charles Tilly dan Lesley J. Wood, *Social Movements, 1768–2004* (Boulder: Paradigm

Publishers, 2009), hlm. 3–4.

b. Repertoire of Contention: Aksi demonstrasi rutin seperti *Wednesday Demonstration*, pendirian *Statue of Peace*, serta pemanfaatan media sosial menjadi bentuk taktik gerakan untuk menyuarakan narasi korban.

c. WUNC Displays: Aksi damai, simbol bersama, partisipasi massa, dan konsistensi lebih dari dua dekade menunjukkan kelayakan moral, solidaritas, kekuatan jumlah, dan dedikasi terhadap perjuangan.

Melalui kerangka Tilly, gerakan ini merupakan contoh gerakan sosial yang terstruktur dan berkelanjutan, menjaga ingatan kolektif dan menekan perubahan kebijakan dalam hubungan Korea–Jepang. Dalam perspektif konstruktivisme, aksi ini membentuk narasi kolektif tentang sejarah kolonial dan keadilan transnasional.

Wednesday Demonstration menjadi ruang publik bagi aktor non-negara untuk merekonstruksi sejarah, menunjukkan bahwa kekuatan hubungan internasional juga berasal dari masyarakat sipil. Aksi ini menjadi simbol perjuangan lintas generasi atas keadilan historis dan diplomasi moral.

D. KESIMPULAN

Isu *comfort women* merupakan permasalahan historis signifikan yang membentuk dinamika hubungan diplomatik Korea Selatan dan Jepang. Dalam kerangka konstruktivisme historis Duncan Bell, isu ini tidak hanya menjadi perdebatan sejarah, tetapi telah membentuk memori kolektif yang tertanam dalam identitas nasional Korea Selatan. Memori ini, yang dilanggengkan melalui kesaksian korban, aktivisme sipil, dan simbol seperti *Statue of Peace*, turut membentuk norma dan kepentingan

dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang.

Skripsi ini menunjukkan bahwa isu *comfort women* berdampak nyata pada hubungan Korea Selatan–Jepang selama 2015–2022, khususnya dalam tiga aspek: (1) hubungan diplomatik formal, (2) kerja sama keamanan, dan (3) relasi ekonomi. Kesepakatan bilateral tahun 2015, meskipun menyatakan penyelesaian “final dan tidak dapat diubah,” tidak diterima oleh mayoritas korban dan publik Korea Selatan. Ini membuktikan bahwa rekonsiliasi historis memerlukan pengakuan tulus, bukan hanya perjanjian formal.

Dalam ranah diplomatik, retorika pemerintah Jepang, terutama di bawah Shinzo Abe, dianggap revisionis. Revisi terhadap *Kono Statement* dan tekanan untuk menghapus patung *comfort women* memperkuat persepsi bahwa Jepang belum sepenuhnya mengakui kesalahan sejarah. Respons ini memperdalam ketidakpercayaan dan menghambat rekonsiliasi.

Dampaknya terasa pada politik domestik Korea Selatan, termasuk penolakan publik terhadap perpanjangan *GSOMIA* dan kampanye #BoycottJapan yang muncul saat konflik dagang 2019. Akar penolakan ini bukan hanya ekonomi, tetapi refleksi luka sejarah yang belum pulih.

Konstruktivisme historis menjelaskan bahwa identitas dan memori kolektif membentuk kepentingan dan tindakan negara. Isu ini tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan hukum atau diplomatik, tetapi sebagai perjuangan narasi, identitas, dan keadilan. Gerakan sosial yang dibangun oleh para penyintas dan organisasi seperti *The Korean Council* menjadi

artikulasi memori kolektif yang menuntut pengakuan dan reparasi.

Untuk mencapai rekonsiliasi sejati, penyelesaian isu *comfort women* memerlukan pendekatan berbasis empati historis dan penghormatan pada narasi korban. Tanpa memenuhi unsur WUNC (worthiness, unity, numbers, commitment), kesepakatan diplomatik akan kehilangan legitimasi. Selama memori kolektif belum diakui secara tuntas, isu ini akan tetap menjadi sumber ketegangan strategis dan hambatan kerja sama regional di Asia Timur.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, Y. (2020). *Whose comfort? Body, sexuality and identities of Korean 'comfort women' and Japanese soldiers during WWII*.
- Alan Gamble and Takesato Watanabe. *A Public Betrayed: An Inside Look at Japanese Media Atrocities and their Warnings to the West*, (Washington DC: Regnery Publishing, Inc. 2004), 334.
- Amnesty International. (2005). *Still Waiting After 60 Years: Justice for Survivors of Japan's Military Sexual Slavery System*.
<https://www.amnesty.org>
- Asih, K. N., & Suksmonohadi, M. (2019). Ketegangan Jepang-Korea Selatan dan Dampaknya Pada Perekonomian. *Bank Indonesia*, 3(i), 113–117.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ekonomi-keuangan-kerjasamainternasional/Documents/8.Bab_5_Artikel.3.19.pdf
- BBCIndonesia. (2014). *Pertemuan Pertama Pemimpin Jepang dan Korea*. Diambil kembali dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140321_jepang_korsel_bertemu
- Chang, W. (2017). *Social Movements and Nationalism: Comfort Women Movement and Narratives of Nation in Post-Democratization Korea, 1988–2007* (Doctoral dissertation).
- Charles Tilly dan Lesley J. Wood, *Social Movements, 1768–2004* (Boulder: Paradigm Publishers, 2009), hlm. 3–4.
- Christine Wawrynek, "World War II Comfort women: Japan's Sex Slaves or Hired Prostitute?", *Journal of Human Rights Summer*, U. N. Reports, New York Law School, (Summer, 2003)
- Digital Museum The Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund* <https://www.awf.or.jp/>
- Ine Kusuma Aryani, "'Comfort Women' Korea Selatan, Karakter yang Terlupakan", *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Vol 1 No 2, (Maret 2022), 111
- Joseph M.G. (2015) *Korean Comfort Women: How Japanese Military Expansion Within East Asia Led to Systematized Prostitution Between 1910 and 1945*. California State University, Chico. Hal 75
- Jung, H. (2021). "Digital Protest in Pandemic Era: Wednesday Demonstration Online." *Korean Journal of Civic Movements*
- Mangkuto, W. S. (2019). *Kronologi Perang Dagang Jepang-Korea, Dari Luka Perang Dunia*. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190829133707-4-95656/kronologiperang-dagang->

- [jepang-korea-dari-luka-perang-dunia/3](#)
- Maria Rosa Henson, *Comfort Woman: A Filipina's Story of Prostitution and Slavery under the Japanese Military*, pengantar oleh Yuki Tanaka, kata pengantar oleh Cynthia Enloe (Rowman & Littlefield, 1999).
- Min, P. G. (2003). *Korean "Comfort Women": The Intersection of Colonial Power, Gender, and Class*. *Gender and Society*, 17, 938–957.
- Ministry of National Defense Republic of Korea. (2016). 2016 Defense White Paper. Seoul: Ministry of National Defense Republic of Korea.
- MoFA. (2020). Ministry of Foreign Affairs, Japan 2020 DIPLOMATIC BLUEBOOK. <https://www.mofa.go.jp/files/100116875.pdf>
- Nurbaiti, I. (2021). *Perdagangan dan Politik: Konflik Ekonomi Korea Selatan–Jepang 2018–2020*. Jakarta: Pustaka Internasional.
- Nurbaiti, L. (2021). Kepentingan Jepang Membatasi Ekspor Bahan Baku Semikonduktor Ke Korea Selatan. *Jom Fisip*, 8(1), 1–23.
- Panda, A. (2017). The 'Final and Irreversible' 2015 Japan-South Korea Comfort Women Deal Unravels. Diambil kembali dari thediplomat.com: <https://thediplomat.com/2017/01/the-final-andirreversible-2015-japan-south-korea-comfort-womendeal-unravels/>
- Prashernanda, H., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2022). *Analisa Transnational Advocacy Network: Transnasionalisme Redress Movement for Comfort Women di Negara Barat oleh The Korean Council 2015-2021*. *Journal of International Relations Diponegoro*, 8(3), 334-345.
- Rahma, D. (2019). *Dampak Boikot Produk Jepang oleh Warga Korea Selatan*. *Jurnal Hubungan Internasional Asia Timur*, 11(2), 105–117
- Sangbo, P. (2016). *Implications of the General Security of Military Information Agreement for South Korea*. Stimson <https://www.stimson.org/2016/implications-general-security-military-information-agreement-south-korea/>
- Soh, C. S. (2008). *The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan*. University of Chicago Press.
- Stetz, M. D., & Oh, B. B. (2015). *Legacies of the comfort women of World War II*. Routledge. Hal 9
- The Korean Council*. (2011). Join The 1000th Wednesday Demonstration. Global Action Day : Justice for *Comfort Women*. Diambil dari https://www.koreaverband.de/wp-content/uploads/2011/07/ComfortWomen_1000Dem_PR-from-Korea_Dec2011.pdf
- Thomas C.Fox. Seoul rally draws attention to 'Comfort Women'. <https://www.ncronline.org/blog/ncr-today/seoul-rally-draws-attention-comfort-women?utm> (diakses pada 10 April 2025)
- Tsuraya, Z. S. (2023). Upaya korea selatan dalam impor bahan kimia semikonduktor pada masa pembatasan ekspor jepang

- tahun 2019. 11(1), 198– 208
- United Nations. (1996). Report on the mission to the Democratic People's Republic of Korea, the Republic of Korea and Japan on the issue of military sexual slavery in wartime. UN Commission on Human Rights.
- VoA. (2023). Pengadilan Korsel Perintahkan 2 Perusahaan Jepang Beri Kompensasi Lebih Besar pada Korban Kerja Paksa. VoA Indonesia.
<https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-korsel-perintahkan-2-perusahaan-jepang-beri-kompensasi-lebih-besar-pada-korban-kerjapaksa/7406930.html>
- Yamaguchi, M. (2014). Comfort Women Statues and Japan's Image. Japan Times, August 13.
- Yonson Ahn, "*The Military 'Comfort Women': An Introduction*" dalam *Whose Comfort? Body, Sexuality and Identities of Korean 'Comfort Women' and Japanese Soldiers during WWII* (Singapore: World Scientific Connect, 2019),
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/9789811206351_0001?srsltid=AfmBOoq31LvIflWk59nMWqVI81JwKqXr16vgcdallut8Hir2-8GEfDF